

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM
2014 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ARTIKEL

Oleh

NONG YOGI PUTRA

NPM: 0710013311045



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2015**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim

Padang, 11 Februari 2015
Yang menyatakan

NONG YOGI PUTRA

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : NONG YOGI PUTRA

NPM : 0710013311045

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi : Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2014 Di
Kabupaten Lima Puluh Kota

Padang, 11 Februari 2015

Pembimbing I

Drs. Yusrizal. M. Si

Pembimbing II

Hendrizar S. IP. M. Pd

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2014 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nong Yogi Saputra¹, Yusrizal¹, Hendrizal¹

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

¹Fakultas Keguruan dan Pendidikan

Universitas Bung Hatta

E_mail: nongcoga@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan antusias masyarakat dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Lima Puluh Kota (2) Mendeskripsikan sikap masyarakat dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Lima Puluh Dalam Pemilihan Umum. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa: 1) Masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2014 dari semua jumlah penduduk hanya sebagian kecil masyarakat yang Golput, 2) Sikap masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2014 ada yang bersikap positif, negatif dan netral dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli, 3) Partisipasi politik pemilihan umum pada pemilu 2014 yaitu pemberian suara, bentuk partisipasi politik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan: (1) Antusias Masyarakat pada Pemilu 2014 Hasil penelitian menggambarkan bahwa masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2014, dari semua jumlah penduduk hanya sebagian kecil masyarakat yang Golput. (2) Sikap masyarakat pada Pemilu 2014 Sikap masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2014 ada yang bersikap positif, negatif dan netral dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. (3) Tingkat partisipasi pemilihan pada pemilu 2014 Partisipasi politik pemilihan pada pemilu 2014 yaitu pemberian suara, bentuk partisipasi politik.

Kata Kunci: Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum.

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2014 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nong Yogi Saputra¹, Yusrizal¹, Hendrizal¹

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

¹Fakultas Keguruan dan Pendidikan

Universitas Bung Hatta

E_mail: nongcoga@yahoo.com

abstract

The purpose of this study was to: (1) Describe the enthusiast community in the 2014 election in District Fifty City (2) to describe the attitude of the public in the 2014 election in District Fifty In General Election. The research in this thesis kuantitatif approach. This research was conducted in the District Fifty Cities. Informants in this study are those that can be used to obtain information about the circumstances panalitian background. The data in this study were obtained through interviews and documentation. The results of this study illustrate that: 1) People are very enthusiastic in the 2014 presidential elections of all population of only a small portion of society that Abstentions, 2) the attitude of society in the implementation of the 2014 elections there were positive, negative and neutral in the presidential election held on July 9, 3) political participation in the upcoming 2014 elections that voting, forms of political participation. Based on the research results and the previous discussion it can be concluded: (1) Enthusiast Community in the 2014 election The results illustrate that the community is very enthusiastic in the implementation of the 2014 presidential election, of all the population of only a small portion of society that Abstentions. (2) The attitude of the public in the 2014 election the attitude of society in the implementation of the 2014 elections there were positive, negative and neutral in the presidential election that was held on 9 July 2014. (3) the level of voter participation in elections political 2014Partisipasi voters in the 2014 elections that voting, forms of political participation.

Keywords: Political Participation and Elections.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (*general election*). Pemilu langsung di daerah dilaksanakan sejak bulan Juni tahun 2005 sebagai konsekuensi logis dari berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan momentum yang baik dalam proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang semakin terbuka dan akuntabel. Perubahan ini setidaknya membawa implikasi yang besar bagi kehidupan di daerah. Pemimpin di daerah akan mendapat *legitimasi* yang kuat melalui Pemilu langsung.

Dengan demikian masyarakat akan memiliki *trust* yang tinggi pada pemimpinnya untuk bersama-sama membangun daerahnya. Hal inilah yang menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yaitu sebagai modal sosial dan kohesivitas masyarakat lokal yang memiliki nilai strategis dalam pelaksanaan *democratic governance* di tingkat lokal. Harapan besar mengenai implikasi Pemilu langsung ini dilandasi oleh dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membuat rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam Undang-undang tentang pemilihan umum sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah.

Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman Undang-undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran

dalam berpolitik, Seta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik. Dalam konteks penguatan demokratisasi, pemilu langsung berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi.

Masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi merupakan langkah awal dalam menuju proses demokrasi yang benar dan substansial. Inilah kehidupan demokrasi yang sebenarnya, bukan demokrasi prosedural yang selama ini telah dijalankan dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi dimaknai sebagai proses yang memiliki implikasi anggaran besar dan tidak bermanfaat.

Terjadinya konspirasi, pelanggaran dan keamanan yang tidak terjamin, etika politik yang terabaikan, saat inilah cara pandang demikian harus dirubah. Realitas ini terlihat dari proses demokrasi langsung yang justru menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks. Tingkat

konflik yang tinggi, konspirasi politik, *money politic* bahkan dampak lain adalah tingginya korupsi di daerah.

Terlepas dari permasalahan tersebut sebenarnya Pemilu langsung memiliki makna strategis yaitu pendidikan politik sekaligus penguatan potensi lokal yang selama ini terabaikan. Sebagaimana disampaikan oleh Murray Print (dalam Mawardi, 2008:67), pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif melalui pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*).

Aktualisasi dari *civic education* terletak kepada tingkat partisipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu ataupun Pemilu. Partisipasi politik yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, di mana aktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan

kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.

Moment Pemilu 2009 tahun inilah dijadikan tolak ukur menilai partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses pendidikan politik yang baik. Semakin tinggi partisipasi menjadi nilai tersendiri akan penguatan proses pendidikan politik, demikian sebaliknya. Partisipasi dimaknai sebagai proses penguatan lembaga lokal yang semakin mengerti dan memahami proses penyelenggaraan kekuasaan di daerah. Masyarakat akan semakin menyadari fungsi dan arti strategisnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelayanan yang baik dan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Menurut Robert M. McIver (dalam Budiardjo, 2009:46), masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Sementara itu Koentjaraningrat (2002:263) mengatakan “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.” Sementara itu Harold dalam

Koentjaraningrat, (2002:265) mengemukakan bahwa “Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.”

Namun sayangnya selama ini partisipasi politik terbatas pada angka tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap Pemilu. Sebelum reformasi bergulir, angka itu selalu berada pada kisaran 90%, hal ini dapat dikatakan partisipasi politik masyarakat tinggi. Sebenarnya realitas tidak menghendaki pemahaman partisipasi politik yang demikian, tepatnya bukan satu-satunya ukuran tentang tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Partisipasi politik yang lebih penting adalah adanya jaminan dan mekanisme yang baku, dan *comfortable* bagi semua rakyat untuk dapat menyalurkan pikiran-pikirannya ke dalam sebuah institusi formal.

Partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat, adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat

memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.

Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu disebutkan oleh Mawardi (2008) disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Pertama, masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas

untuk mewujudkan harapan mereka. Selain itu, mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka.

Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, diakibatkan persoalan teknis dalam pemilu. Dalam hal ini, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT, sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih. Persoalan DPT selama pelaksanaan pemilu menjadi masalah krusial yang sepertinya tidak memiliki solusi. Sebab serangkaian pemilu sudah berlangsung, masalah DPT yang tidak akurat tetap menyisakan persoalan rendahnya partisipasi pemilih. Ketiga, (partisipasi juga dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih). Dalam hal ini, banyak pemilih yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan kebutuhan individualnya; pergi ke sawah, masuk kerja bagi buruh pabrik atau tidak mudik bagi yang merantau daripada pergi ke TPS untuk mencoblos.

Tantangan mendesak adalah menjadikan Pemilu sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis. Inilah esensi dari partisipasi politik rakyat. Selama proses Pemilu masih didominasi oleh elit-elit partai politik yang bermental korup, maka rakyat akan merasakan pemilu sebagai euphoria semata. Selain itu, pemilu akan menjadi euphoria ketika praktek manipulasi, *money politik* dan kekerasan politik masih berlangsung. Oleh karena itu rakyat hendaknya diberikan kemerdekaan untuk menentukan pilihannya. Rakyat harus mampu menentukan hak-hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab. Sebagai proses yang baru dan meniscayakan kehidupan demokratis yang lebih beradab, maka pemilu harus mampu dipahami sebagai suatu proses yang penuh dengan dinamika. Selain itu, kesiapan teknis yang selama ini menjadi domain pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum pada persoalan pendataan pemilih harus segera ditingkatkan supaya hak warga memilih tidak hilang secara percuma.

Berdasarkan berbagai catatan dan kondisi yang telah ditentukan

tersebut perlu perhatian terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Untuk itulah sekiranya perlu kajian guna mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu. Mengenai berbagai dimensi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, salah satunya yaitu berkaitan dengan persepsi dan motif masyarakat dalam partisipasi.

Berdasarkan hal di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

Partisipasi dapat diartikan sebagai tindakan atau menyatakan pengambilan bagian dalam aktivitas, juga dapat diartikan sebagai hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, dapat juga digunakan kata keikutsertaan atau peran serta (Kamus Bahasa Indonesia, 1988).

Tilaar(2009:287)

mengungkapkan Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi, melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*)

dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Lebih rinci Cohen dan Uphoff dalam Irene, (2011:61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu: *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi.

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian Wijaya, (2004:208). Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi (2001:201-202), partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka,

membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok partisipasi adalah sebelum seseorang individu akan melibatkan dirinya pada semua kegiatan yang bersifat sukarela dalam proses partisipasi maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan baginya untuk melakukan sesuatu.

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Pengertian partisipasi politik dalam perspektif sosiologi politik, terdapat dalam *International Encyclopedia of the Sosial Sciences* yang dikutip oleh McClosky (dalam Miaz, 2012:22), yaitu partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui hal mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Sedangkan partisipasi menurut Miriam Budiardjo (dalam Miaz,

2012:21) adalah tindakan-tindakan bertujuan untuk mempengaruhi kepuasan-kepuasan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Menurut Miriam Budiardjo (dalam Miaz, 2012:21) “partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat”. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan.

Masyarakat memiliki minat dan perhatian terhadap masalah kewarganegaraan serta dengan kesadaran tersebut mereka ikut terlibat dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian

seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia tinggal.

Status sosial dan status ekonomi ini meliputi kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai pendidikan, dimana menurut Poerbokowatjo (2005:19), pendidikan adalah suatu proses pengoperan pengalaman, kecakapan dan keterampilan, dan pendidikan ini pada dasarnya terdiri dari tiga bentuk yaitu a) Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang dikenal dengan pendidikan di sekolah yang diatur bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas. B) Pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan, tapi tidak perlu mengikuti peraturan ketat dan tetap. C) Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak kecil hingga meninggal dunia dalam pergaulan.

Menurut Surbakti (1992:52) Faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya

partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik, dimana yang dimaksud dengan kesadaran politik di sini adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia tinggal.

Berdasarkan teori di atas dapat dimaknai bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah karakteristik pribadi seseorang, dimana orang yang berwatak sosial mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap problem sosial.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan persyaratan penting dalam negara demokratis. Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilu diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka (Jimly, 2013:1).

Pemilu adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan

jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi

persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti dapat melihat secara mendalam tentang fenomena yang terjadi, sehingga dengan data yang didapat peneliti mampu menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan penelitian mengenai strategi guru menggunakan bahan ajar.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengambilan lokasi berdasarkan pertimbangan dari hasil observasi awal peneliti di Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 2014 di Kabupaten Limapuluh Kota.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini informan diambil dengan *teknik purposive sampling* yaitu didasarkan atas tujuan tertentu. Informan disengaja dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang diperlukan dalam penelitian yang dapat memberikan informasi yang diperlukan.

Setelah dilakukan penelitian, maka informan penelitian terdiri dari masyarakat, camat dan KPU.

Teknik pengumpulan data yang digunakan (a) wawancara dan (b) observasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Lamapuluh Kota: Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian (Bungin, 2008:100). Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan langsung dari informan, untuk mendapatkan informasi yang

lebih konkret dari pendirian seseorang atau kelompok orang yang tidak didapat melalui pengamatan. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh keterangan lebih dalam tentang pemilihan daerah Kota Payakumbuh. Dalam pengumpulan data peneliti juga memanfaatkan dokumentasi yang ada. Menurut Arikunto (2002:206), studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Sedangkan menurut Sugiyono (2006:329), studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. 1) Pengumpulan data Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi wawancara, dan observasi, dan dokumentasi kepada informan. Pengumpulan data melalui berbagai sumber dan wawancara dengan informan mengenai pemilihan Pemilu diharapkan bisa memperkaya

data. 2) Reduksi Data Setelah data terkumpul maka data tersebut diseleksi dan diolah yang meliputi proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan. 3) *Display* Data, Setelah dilakukan reduksi data maka selanjutnya tahap *display* data atau penyajian data, yaitu merangkai data dalam organisasi data, sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan. Data diolah dan disajikan dengan merangkai data dalam organisasi data, sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan. 4) Penarikan Kesimpulan, Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menjelaskan tentang makna data dalam suatu konfigurasi sehingga dapat menunjukkan kausalnya

Hasil Penelitian

1. Antusias Masyarakat dalam Pemilu 2014

Melihat tingginya antusiasme dalam kegiatan tersebut, Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Limapuluh Kota Ilham Yusardi mengatakan ia sangat optimis tingkat partisipasi

pemilih kan meningkat pada pemilu mendatang. Ini adalah satu upaya kita untuk menguatkan hati masyarakat untuk tidak golput. Dalam kegiatan ini kita berkali kali mengajak masyarakat untuk ikut mencoblos pada 9 April nanti,” ujar Ilham yang sebelumnya berprofesi sebagai wartawan. Pada kesempatan tersebut Kapolres Limapuluh Kota AKBP Cucuk Trihono mengatakan, bahwa Polri siap mengamankan Pemilu 2014 mendatang. Polisi adalah Lembaga yang netral dalam pemilu.

2. Sikap Masyarakat dalam Pemilu 2014

Hasil wawancara menggambarkan bahwa bersikap positif dalam pelaksanaan pemilu 2014, dalam hal ini terdapat bahwa suatu negara mesti harus ada yang memimpin dan pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani.

Berbeda dengan pendapat Yudi yang mengatakan bahwa

Saya tidak mau ikut pemilihan presiden nantinya sebab memilih dan tidak memilih tidak ada hubungan dengan kehidupan saya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya

harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya.

Hal di atas menggambarkan bahwa informan di atas mempunyai sikap yang negatif dalam pelaksanaan pemilu, sebab informan beranggapan bahwa memilih dan tidak memilih tidak ada manfaatnya bagi dirinya.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

a. Pemberian Suara

Berkaitan dengan pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 antusias pemilih dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Hal ini dilihat dari bercita acara pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilu tetap 266.533 pemilih diantaranya datang ke TPS untuk memberikan suaranya.jumlah pemilih tetap 264.630, jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. 256, pemilih khusus tambahan (DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau pasport 1.593, total keseluruhan jumlah pemilih 266.533 pemilih.

b. Kampanye

Kampanye pemilu merupakan sarana pesta demokrasi. Bagi pemilih di Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan sudah mengetahui tujuan kampanye dan mereka beranggapan bahwa kampanye merupakan kegiatan menyampaikan informasi dan menunjukkan visi dan misi dan program partai, politik dalam pemilu sehingga menarik simpati masyarakat untuk memilihnya. Anggapan pemilih pemula di Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa kampanye merupakan sesuatu kegiatan yang menyita waktu yang banyak dan harus mengalahkan segala rutinitas dan kegiatan mereka sehari-hari mengakibatkan para pemilih enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang menyenangkan karena mereka mendapat hiburan selain itu juga mereka dapat memberikan dukungannya kepada calon legislatif yang mereka dukung.

c. Berbicara Masalah Pemilu 2014

Pemilu 2014 mempunyai tempat yang istimewa di hati pemilih pemula di Kabupaten Lima Puluh Kota dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informasn yang menyatakan bahwa mereka sering membicarakan

bahkan mendiskusikan tentang masalah pemilu dan siapa yang akan dipilih sebagai calon presiden.

Berdasarkan hasil wawancara tergambar bahwa masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan pemilu 2014, dimana yang dulunya masyarakat Golput sekarang mau atau ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan kebanyakan masyarakat mendukung Prabowo sebagai presiden nantinya.

Pembahasan

1. Antusias Masyarakat dalam Pemilu

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 lebih tinggi daripada partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkada "Antusiasme publik terhadap pemilu sebenarnya cukup tinggi, bisa mencapai 90 persen," kata Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group Andrinof Chaniago di Jakarta. Namun dari angka tersebut, sekitar 10 persen terindikasi golput. Karena lima persen di antaranya mengaku tidak akan datang ke TPS dengan alasan keinginan pribadi. Sementara

sisanya lima persennya menyatakan golput karena banyaknya kesalahan administrasi. Partisipasi politik tidak lebih dari keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan, atau juga dijelaskan secara substantif bisa berarti upaya atau usaha terorganisir oleh konstituen atau warga Negara yang baik untuk memilih para pemimpin yang mereka nilai baik juga. Partisipasi ini mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bersama dalam lingkup suatu bangsa dan negara. Partisipasi politik ditekankan pada aspek untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau visi dan misi elit politik tertentu.

2. Sikap Masyarakat dalam Pemilu

Perilaku pemilih dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting. Karena di dalam menentukan apakah pemilihan umum berhasil, maka perilaku pemilih masyarakatnya akan menjadi faktor penentu yang penting pula. Bila di dalam pelaksanaan pemilihan umum ternyata dapat dilihat bahwa masyarakat tidak terlalu ikut ambil bagian di dalamnya, misalnya dengan tingginya angka golput,

berarti pemilihan umum tersebut dapat dikatakan kurang berhasil dilaksanakan. Terbukti dengan masyarakatnya yang kurang memberi perhatian pada pesta demokrasi itu. Karena pentingnya sikap positif pemilih di dalam pemilihan umum, maka perlu diadakan kajian intensif terhadap perilaku pemilih itu sendiri.

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Budiarjo (2009: 6) menyebutkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah negara. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan dengan pejabat atau anggota parlemen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Michel Rush dan Philip Althoff yang menyatakan bahwa bentuk partisipasi politik yang

paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*). *Voting* merupakan bentuk partisipasi politik yang tidak menuntut banyak upaya. Kegiatan ini dilakukan pada saat diperlukan. Untuk melakukan kegiatan ini yang diperlukan hanyalah sedikit inisiatif (Maran, 2001:151).

Jika dihubungkan dengan pendapat Roth dan Wilson (Surya, 2007:137) maka bentuk partisipasi politik ini juga terletak pada posisi paling bawah. Karena seperti piramida, dengan adanya mayoritas partisipasi politik terletak di berada pada jenjang pengamat. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini biasanya melakukan kegiatan kegiatan politik seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik mengikuti perkembangan politik melalui media masa dan memberikan suara dalam pemilu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat

disimpulkan: 1)Antusias Masyarakat pada Pemilu 2014

Hasil penelitian menggambarkan bahwa masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2014, dari semua jumlah penduduk hanya sebagian kecil masyarakat yang Golput. 2)Sikap masyarakat pada Pemilu 2014. Sikap masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2014 ada yang bersikap positif, negatif dan netral dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. 3) Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2014

Partisipasi politik pemilih pada pemilu 2014 yaitu pemberian suara, bentuk partisipasi politik.

Saran

Saran yang disampaikan oleh peneliti adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih terbuka dalam berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan lebih tertarik dengan partai politik yang ada.
2. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pemilih dalam dunia politik, serta

pemberian pendidikan politik yang ditunjukkan khusus untuk pemilih sehingga dapat merangsang keinginan pemilih untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya meneliti lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Arikunto, Suharsimi 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia.

Bungin, M. Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. Jakarta: Balai Pustaka.

Mawardi J., M.. 2008. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Madani", dalam Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 4, Nomor 1, Juni 2008.